

PANEL: AGAMA DALAM MASYARAKAT MAJEMUK INDONESIA

**ISLAM MODERN DAN ISLAM RADIKAL:
ISLAM DALAM DINAMIKA KELAS.***

Oleh:

Hasantoha Adnan S.♥

Alif Purnomo♥♥

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang mendorong munculnya gerakan reformasi pada akhirnya mampu me-*lengserkan* Soeharto, yang telah memimpin negeri ini, melalui lokomotif orde barunya- selama lebih dari 3 dasa warsa. Keberhasilan ini disambut dengan sangat antusias bahkan telah berkembang menjadi *euphoria*. Munculnya puluhan partai-partai politik yang kemudian dilanjutkan dengan keberhasilan melaksanakan Pemilu 1999, yang dianggap pemilu paling demokratis setelah 1955, membawa angin segar dalam kehidupan bangsa yang telah merindukan demokrasi sekian lama.

Begitu juga dengan umat Islam, yang menjadi mayoritas bangsa ini, menyambut dengan sukacita. Angin segar ini tak berlangsung lama, karena kenyataan membuktikan dalam pemilu tersebut, justru partai-partai Islam rontok. Adegan-adegan selanjutnya justru makin memperkeruh suasana reformasi. Para elit politik memperlihatkan akrobta politik yang makin membingungkan, bukan saja umat Islam tetapi juga bangsa ini secara keseluruhan.

Situasi ini sebetulnya sudah diprediksi oleh Hefner melalui pengkajian panjangnya tentang dinamika Islam di Indonesia, yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa gagasan untuk satu islam, adalah mitos belaka, mengingat begitu banyaknya peluang perbedaan dalam menafsirkan Islam dalam konteks-konteks dimana penganutnya tinggal. Karena sesungguhnya, lanjut Hefner, tak ada yang tunggal. Tidak ada penjelasan tunggal yang dapat menerangkan fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Karenanya kita perlu secara tegas menampik segala jenis universalisasi dan berbagai simplifikasi yang stereotip bagi fenomena-fenomena sosial semisal Indonesia, Islam, Orde Baru, Soeharto, dan tentara. Juga tak ada skenario tunggal untuk tumbuhnya kapitalisme, masyarakat sipil, dan demokrasi. Masing-masing kisah memiliki kekuatan-kekuatan potensial berupa artikulasi-artikulasi lokal yang saling tarik-menarik dan tidak sederhana. Ia dapat meliputi variabel interaksi masyarakat, peran negara, struktur politik, dan kebudayaan-dan itu semua terjalin secara cukup rumit.¹

Setiap posisi Islam politik telah menciptakan kekuatan potensial berupa artikulasi-artikulasi lokal yang tarik-menarik dan sangat beragam. Hubungan sosial yang terjadi dapat meliputi variabel interaksi masyarakat, peran negara, struktur politik, kebudayaan dan sebagainya yang terjalin secara rumit. Bagi Hefner, beragamnya pola susunan Islam politik ini tidak dapat dicairkan dalam waktu singkat. Tidak heran kalau sekarang pun, ketika kekuatan

* Makalah disampaikan pada Simposium dan Lokakarya Internasional II: *Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu dialektika menuju Indonesia Baru*, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, 18-21 Juli 2001.

♥ Alumnus Antropologi FISIP-UI dengan skripsi berjudul *Kemoderenan dalam Pemahaman Keislaman: Interpretasi Islam Oleh Kelas Menengah Muslim Perkotaan (Studi Kasus Peserta Yayasan Wakaf Paramadina)*.

♥♥ Mahasiswa Antropologi FISIP-UI angkatan 1995, saat ini tengah menyelesaikan skripsi dengan tema tentang *Tafsir Islam dan Radikalisme, Studi Kasus pada organisasi Front Pembela Islam*.

¹ Lihat Robert W Hefner, *Islam, Pasar, Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapitalisme, dan Demokrasi*, LkiS: Yogyakarta, Maret 2000

Islam politik dari berbagai aliran sudah mampu menguasai lembaga-lembaga negara, sikap curiga antara Islam politik dan elemen negara tetap terlihat.

Ini tentunya menolak asumsi Ernest Gellner, seorang filsuf dan antropolog sosial asal Inggris, yang mengatakan bahwa Islam politik adalah musuh abadi pluralisme dan kebebasan sipil serta gagal mendukung keberadaan asosiasi-asosiasi tandingan (hal 188). Islam politik bagi Gellner lebih menekankan pada keutamaan hukum-hukum Tuhan yang cenderung membunuh kebebasan dan pluralisme sosial. Gellner cenderung menggeneralisir fenomena Islam politik sehingga gagal memahami potensi-potensi yang justru mendukung demokrasi dan pluralisme. Tulisan ini berangkat dari gagasan tersebut. Dengan memperlihatkan bagaimana fenomena keberagaman di perkotaan, khususnya metropolitan. Kajian ini menjadi penting, karena masih belum banyaknya penelitian mengenai ekspresi keberagaman di perkotaan.

Kajian ini menjadi penting, karena sebelum munculnya krisis yang berkepanjangan, lebih dari 25 tahun Indonesia telah melaksanakan pembangunan ekonomi yang spektakuler² yang membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi.³ Tak pelak kemudian, fenomena ini disebut-sebut sebagai “masyarakat komoditas Indonesia.”⁴

Kenyataan ini segera diikuti dengan munculnya ekspresi keberagaman ‘ala’ masyarakat perkotaan, khususnya menengah ke atas. Fenomena ini dapat terlihat di penghujung dasawarsa 1980-an, di mana bermunculan da’i-da’i (juru da’wah) muda dengan gaya pekerja kantoran, menggunakan dasi dan berjas dan berda’wah di kantor-kantor seusai sholat Zhuhur. Ataupun meningkatnya jumlah orang yang pergi umrah ke tanah suci, hal ini bisa dilihat makin menjamurnya biro-biro perjalanan yang menyediakan paket perjalanan umrah. Bahkan munculnya fenomena berbuka puasa di hotel-hotel, atau pun cafe, suatu tempat yang selama ini dipahami sebagai ‘produk’ dunia sekuler. Fenomena inilah yang kemudian dianggap sebagai kelahiran kelas menengah Islam. Ukuran golongan menengah ini diukur berdasarkan tingkat pendapatan dan gaya hidup mereka. Sedangkan predikat “Islam” diukur dari pengetahuan dan wawasan keagamaannya. Mereka ini tersebar ke dalam berbagai sektor pekerjaan.⁵

² Berdasarkan laporan Bank Dunia (1990b) dijelaskan bahwa pada pertengahan tahun 1960-an, pendapatan per kapita Indonesia termasuk yang paling rendah di dunia. Sebagai perbandingan, pada tahun 1966, GNP Indonesia adalah US\$ 50 per kapita, yang artinya hanya setengah dari GNP di negara-negara seperti India, Bangladesh, dan Nigeria. Tetapi, memasuki tahun 1980-an, GNP Indonesia meningkat hampir mencapai US\$ 500 perkapita, yang berarti 30% lebih tinggi daripada GNP India, 49% dari GNP Nigeria, dan 150% lebih tinggi daripada GNP Bangladesh. Belum lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata adalah 6% pertahun (*Lihat Pidato Pertanggungjawaban Presiden/ Mandataris MPR RI di depan Sidang Umum MPR-RI, tanggal 1 Maret 1993, di Jakarta*) menempatkan Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi secepat itu di seperempat abad terakhir.

³ ini segera dirasakan di seluruh bidang kehidupan, dengan modal dan teknologi menjadi alat utama bergeraknya pembangunan. Secara fisik, kemajuan ini segera dirasakan, terutama di perkotaan; jalan-jalan, gedung-gedung, pusat-pusat perbelanjaan, yang semakin bertaburan. Pertumbuhan ekonomi ini mendorong munculnya ‘daftar’ orang kaya baru di Indonesia. Mereka adalah kaum terdidik, kaum profesional, pekerja media, artis, dengan gaya hidup tersendiri. Mereka biasa membanjiri mal-mal, menonton pertunjukan kesenian, berdasar, telepon genggam.

⁴ Lebih jauh fenomena ini direkam dalam buku *Ecstasy Gaya Hidup: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*, editor: Idi Subandy Ibrahim, Bandung Mizan, 1997.

⁵ Mereka dapat diidentifikasi sebagai berikut; Meski pada umumnya mereka mendapatkan pendidikan formal melalui sekolah-sekolah umum, yang mengajarkan pengetahuan umum, mereka juga mengenyam pengajian, yaitu mengajarkan pengetahuan agama baik di rumah, surau ataupun masjid. Sehingga walaupun dididik di lingkungan ‘sekuler’, pengetahuan agama mereka juga tak kurang. Setamatnya dari pendidikan menengah, banyak di antara mereka kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, baik yang berstatus universitas umum maupun khusus ilmu-ilmu agama (seperti IAIN), ataupun keduanya. Sebagian lainnya mencari pekerjaan ke sektor swasta, ABRI, dan lainnya. Untuk ini, Mahasin menyebutnya sebagai gelombang “priyayisasi santri.” Sewaktu kuliah, mereka aktif dalam organisasi kepemudaan ataupun kemahasiswaan Islam yang tersebar di HMI, PII, IMM, PMII, Pemuda Muhammadiyah, ataupun organisasi

Keberhasilan pembangunan ini, juga diikuti dengan berbagai bentuk kegagalan. Semakin melebarnya perbedaan antara kelompok kaya dengan miskin, merebaknya korupsi dan semakin kerasnya tindak represi negara terhadap berbagai bidang kehidupan, berkembangnya prasanagka etnik. Bukti kegagalan ini mengemuka ketika kerusuhan Mei 1998, makin berkembangnya praktek-praktek kekerasan, dan masih banyak lagi.

Makalah ini akan menyoroti 2 lembaga keagamaan yang hadir dalam konteks perkotaan. Kedua lembaga ini, meski lahir dalam masa yang berbeda, namun dalam perjalanannya telah memberikan peran yang signifikan dalam memahami Islam secara lebih mendalam. Kedua lembaga ini akan dikupas secara garis besar meliputi konteks kelahiran, bentuk tafsiran atas teks agama, dan tanggapan peserta ataupun anggota terhadap lembaga tersebut.

KASUS 1: YAYASAN WAKAF PARAMADINA

Yayasan Wakaf Paramadina⁶ didirikan pada tanggal 31 Oktober 1986, yang peresmiannya diadakan di Hotel Sari Pacific, Jakarta.⁷ Yayasan yang pada awalnya dipimpin oleh Dr. Nurcholih Madjid ini menegaskan bahwa visi dasar Paramadina adalah suatu bentuk pemahaman keislaman yang ingin meresponi perkembangan kemodernan dalam konteks keindonesiaan, ataupun sebaliknya, keindonesiaan dalam konteks kemodernan, dengan bertitik tolak pada apa yang disebut sebagai "Pesan Ketuhanan."⁸ Visi kemodernan ini, menurut Cak Nur, demikian ia biasa disapa, adalah "suatu keharusan, malahan kewajiban yang mutlak. Modernisasi merupakan perintah dan ajaran Tuhan yang Maha Esa."⁹ Maka keislaman dan kemodernan adalah suatu yang identik.¹⁰ Di sini Nurcholish menganggap

intrakampus, sehingga kehidupan kampus diwarnai oleh keislaman yang kental. Kalau pada mulanya kampus dikenal sebagai lembaga yang menyebarkan nilai-nilai sekuler, pada dasawarsa 1970-1980-an, kondisinya berbalik, justru kampus menjadi sarana efektif menyebarkan ide-ide keislaman, seperti di Masjid Salman-ITB, Masjid Arief Rachman-UI, dan lain-lainnya.

Menurut Aswab Mahasin terdapat "tiga faksi" dalam golongan menengah muslim; *Golongan atas*, seperti menteri-menteri, anggota DPR, direktur dan berbagai posisi penting lainnya dalam negara dan perusahaan negara. Di sekeliling kelompok ini juga terdapat pengusaha yang memperoleh proteksi negara. Banyak di antaranya dahulu dikenal sebagai aktifis mahasiswa. *Golongan profesional*, seperti eksekutif, manager, pakar teknik, konsultan, akuntan, dll. Mereka menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian dan pendidikannya serta secara tak langsung melalui sistem perlindungan birokrasi. Dan terakhir, *Golongan bawah*, seperti pegawai sipil rendah, pengusaha kecil, pekerja pabrik, pekerja transportasi dan berbagai fasilitas umum lainnya. Ciri-ciri golongan menengah muslim ini adalah; (1) tidak lagi radikal, pragmatis walaupun tidak oportunistik, menghilangkan negara Islam, dan menghargai *platform* negara nasional, dan (2) keadaan ini diikuti oleh matinya pengusaha muslim dan munculnya kelompok profesi baru yang beragam.

⁶ Nama "Paramadina" sendiri dipilih bukan tanpa arti. Setidaknya terdapat dua macam pengertian dari nama tersebut. Pengertian *pertama*, merupakan gabungan dari dua bahasa, yaitu parama, yang berasal dari bahasa Sansekerta, berarti "mengutamakan", sedangkan Dina, berasal dari bahasa Arab, yang berarti "agama kita". Dengan demikian Paramadina, berarti "mengutamakan (mengagungkan) agama kita (Islam)." *Kedua*, Paramadina berasal dari kata Para dan Madina(h). Para berarti pro atau mendukung, sedangkan madinah berasal dari bahasa Arab yang berarti kota. Kata "madinah" satu akar kata dengan tamaddun, yang berarti "bergabung dengan masyarakat berkewargaan (sipil)," "menjadi peradaban," atau "menjadi halus." Madinah menunjukkan lokasi dari tamaddun. Jadi madinah berarti tempat terwujudnya masyarakat yang berperadaban dan berbudi halus.

⁷ Para pendiri yayasan ini adalah Drs. Abdul Latief, Ir. Ahmad Ganis, Drs. Ahmad Rifai, Abdillah Taha, Anniswati M. Kamaluddin, SE., Darnis Habib, Drs. Fahmi Idris, Prof. M. Dawam Rahardjo, SE., Drs. Mustofa Anis, Moosolly Noor, Ir. Muhammad Yahya, Dr. Nurcholish Madjid, dr. Sugiati Ahmad Sumadi, SKM., Dr. Ir. Tawang Alun (alm), Utomo Danandjaya, dan Usep Fathuddin, MA.

⁸ Budhy Munawar-Rachman, dalam kata pengantar editor, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.

⁹ Nurcholish Madjid, *Modernisasi ialah Rasionalisasi bukan Westernisasi*, dalam kumpulan tulisannya "Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan", Bandung: Mizan, 1988, hal. 171-203.

¹⁰ *Ibid*,

modernitas sebagai kebenaran, dan modernisasi sebagai proses untuk mencapai kebenaran itu.

Respon ini dirasa perlu mengingat saat ini, Dunia Islam sedang menyongsong abad kebangkitan Islam dan keterlibatan dalam mengisi pembangunan.¹¹ Selain itu masih kuatnya citra negatif umat Islam di mata Barat, yang banyak menilai, malah menuduh, bahwa agama Islam adalah agama yang tidak cocok dengan zaman modern, dan paling banyak menghambat kemajuan.¹²

Untuk itu, Paramadina secara sadar meresponnya dengan berbagai cara, yaitu melalui jalur tradisi.¹³ Dalam hal ini tradisi yang dimaksud adalah tradisi yang dinamis, yang responsif terhadap tantangan zaman, bukanlah yang terdiri dari pola-pola pandangan hidup praktis dan tingkah laku yang membeku karena kemutlakan sejarah. Tradisi yang dinamis menghendaki adanya dialog yang hidup, yang dengan tekun dikembangkan, meskipun dialog itu, untuk keotentikannya, dan demi kekuatannya sendiri harus berlangsung secara mengakar dalam kerangka acuan bersama yang diambil dari masa-masa kreatif itu.¹⁴ Dengan bersikap kritis terhadap tradisi, dalam hal ini tradisi Islam, akan menumbuhkan suatu pemahaman keagamaan secara intelektual dan rasional yang membebaskan dari pemahaman keagamaan yang melulu dogmatis dan normatif. Seterusnya, yang harus dicari ialah bagaimana memelihara segi-segi yang baik dari masa lampau dan sekaligus mengambil hal-hal yang lebih maju dan lebih bermanfaat dari masa sekarang.

Lebih lanjut yang harus dipahami adalah bahwa, modernisasi telah membawa perubahan yang besar dalam kehidupan manusia. Teknologi transportasi dan komunikasi telah mengubah pola-pola hubungan global dan antar manusia, sehingga hampir tidak ada satu pelosok pun yang tidak terpengaruh dan terisolir dari peradaban modern. Fenomena yang dikenal sebagai desa buana (*global village*) ini menuntut bahwa setiap perubahan dan persoalan tidak saja dialami dan perlu direspon oleh umat Islam semata, tetapi oleh semua golongan dan kelompok yang ada. Karenanya perlu juga dipahami bersama, baik oleh kelompok-kelompok maupun golongan-golongan di dalam satu agama (*internal*) maupun antar agama (*eksternal*) suatu landasan bersama dalam mengatasinya. Dalam hal ini, Pancasila menjadi landasan terbaik yang telah diberikan umat Islam bagi kehidupan berbangsa.

Untuk mewujudkan itu semua, diperlukanlah kelembagaan yang dapat mengaitkan nilai-nilai universal itu dengan lingkungan yang nyata. Kelembagaan itu dibentuk atas persamaan komitmen dan aspirasi dalam bentuk paguyuban. Paguyuban yang dimaksud adalah; *pertama*, berfungsi sebagai penengah (*wasith*), agar memiliki kebebasan untuk melihat permasalahan secara benar, tanpa pemihakan a priori. *Kedua*, hendaknya masih bisa memberi

¹¹ Gejala yang awalnya muncul sebagai "berkah" pasca perang dunia ke dunia bagi negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, yaitu dengan bermunculannya negara merdeka. Kemerdekaan itu, selain melepaskan dari kungkungan penjajahan dan peningkatan harga diri, tetapi kemudian diikuti juga oleh problem selanjutnya, yaitu bagaimana mengisi kemerdekaan. Model pembangunan yang seperti apakah yang akan digunakan? Apakah Islam mampu menawarkan suatu model pembangunan? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang senantiasa muncul di awal masa negara-negara yang baru merdeka.

¹² Ditambah lagi oleh kenyataan bahwa pada saat ini tidak satupun negeri yang berpenduduk Muslim yang berhasil mencapai kemajuan yang setaraf dengan bangsa-bangsa Barat, *ibid*, hal. 13

¹³ Tradisi dalam hal ini menjadi sarana, untuk menanggapi tantangan zaman. Karena sebenarnya, sebagai agama yang telah melewati sejarah sepanjang empat belas abad, Islam memiliki tradisi masa lampau yang gemilang. Maka berdasarkan kemampuan Islam memimpin dan memberi kontribusi kepada peradaban dunia masa lalu, tidaklah mustahil bahwa Islam akan maju lagi dengan kontribusi-kontribusi yang kreatif dan konstruktif.

¹⁴ *Ibid*, hal. 13

ruang bagi anggotanya untuk bebas menyatakan diri dan mengambil peranan, namun secara keseluruhan harus cukup kuat untuk ikut memberi pengarahan kepada masyarakat. *Ketiga*, menjadi ajang pengembangan pandangan hidup yang lebih tinggi yang memberikan makna transendental daripada sekedar seperangkat kaedah-kaedah untuk menopang hidup praktis. *Keempat*, hendaknya tumbuh menjadi wahana untuk menanamkan ilham kepada sebanyak mungkin orang, guna mengambil bagian dalam pembangunan umat manusia.

Dengan latar belakang paguyuban tersebut, tak heran kemudian Paramadina mengedepankan tiga sifat utama, yaitu *Independen*, dimaksudkan bahwa Paramadina tidak berafiliasi dengan salah satu kekuatan orsospol, baik di dalam maupun luar negeri, dan hanya mengorientasikan keberadaannya pada kebenaran dan cita-cita kemanusiaan; *terbuka*, berarti Paramadina merupakan wadah dan sarana di mana sekumpulan orang bertemu dan berdialog secara jujur, terbuka, dan demokratis. Dengan ini semua diharapkan bahwa suatu kebenaran dari siapa pun datangnya, selain Tuhan YME, adalah nisbi dan relatif, karenanya terbuka untuk diuji kebenarannya; dan terakhir adalah *kultural*, yaitu tidak mengorientasikan pada persoalan-persoalan politis, dalam pengertian praktis. Dengan demikian tawaran kultural itu lebih mengarah pada kerja-kerja produktif dan konstruktif, yang kriterianya antara lain sebagai berikut: *Pertama*, tidak semata-mata menunjuk kepada hal-hal sempit atau partisan. Misalnya, politik dan ideologi semata. *Kedua*, responsif terhadap tantangan zaman. Hal ini sebenarnya sudah dibuktikan oleh berbagai produk kreatif para intelektual Islam klasik, yang semua karyanya merupakan bentuk kreatif atas tantangan zaman. *Ketiga*, tawaran kultural merupakan hasil dialog dengan tuntutan ruang dan waktu. Dalam konteks Indonesia, maka ia harus merupakan proses dari dialog dengan tuntutan di Indonesia. *Keempat*, tawaran kultural harus bersifat inklusif dan menghindari sikap dan gaya-hidup eksklusif.

Dalam konteks Indonesia, berdirinya Paramadina juga merupakan antisipasi terhadap adanya intellectual booming di kalangan santri. Diketahui bahwa umat Islam mulai bersekolah pada tahun 1950-an. Karena itu, baru pada tahun 1970-an banyak umat Islam yang berhasil menjadi sarjana. Maka pada tahun tersebut bagi umat Islam Indonesia sebagai masa 'panen' sarjana. Karenanya dasawarsa berikutnya, yaitu tahun 1980-an, Indonesia mengalami satu *intellectual booming*, di mana para intelektual Islam mulai memiliki orientasi program ke luar (*outward looking*), yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu masih membenahi ke dalam (*inward looking*). Maka sejak itulah, kerja-kerja produktif kaum Muslim Indonesia mulai terarah dan lebih bersifat *problem solving*.¹⁵

Untuk mewujudkan hal tersebut, disusunlah program pokok kegiatan berkisar pada meningkatkan dan menyebarkan paham keagamaan Islam yang luas, mendalam dan bersemangat keterbukaan dengan titik berat kepada:

1. pemahaman sumber-sumber ajaran Islam, khususnya masa lahir dan proses pembentukannya, dalam kaitannya dengan lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain.

¹⁵Pada Klub Kajian Agama pertama, yaitu pada tanggal 28 Nopember 1986 dengan pemakalah Prof. Dr. Munawir Sadzali (waktu itu Menteri Agama RI) dan Dr. Nurcholish Madjid. Tema dialog adalah "Reaktualisasi Ajaran Islam". Salah satu pernyataan Pak Munawir yang menjadi perdebatan panjang adalah mengenai masalah hukum waris. Bagi Pak Munawir, kalau saja hukum waris Islam masih memberikan pembagian warisan dengan perhitungan anak laki-laki mendapatkan jatah dua kali lipat dari jatah anak perempuan, maka alangkah tidak adilnya hukum (waris) Islam itu. Dan banyak sekali umat Islam, kalau saja itu yang menjadi patokan, berkhianat terhadap hukum waris tersebut, karena tidak lagi mendasarkan pembagian warisannya pada hukum tersebut.

2. penyadaran tentang sejarah pemikiran Islam, suatu hubungan dialektik antara ajaran dan peradaban Islam yang terjadi dan berlangsung dalam panggung sejarah umat Islam.
3. apresiasi terhadap khazanah budaya dan peradaban Islam dan bangsa-bangsa Muslim.
4. penanaman semangat non-sektarianisme dan pengembangan serta pemeliharaan Ukhuwah Islamiyah yang berkonotasi dinamis dan kreatif.
5. pendalaman dan perluasan studi perbandingan mazhab-mazhab dan aliran-aliran dalam Islam, antara lain guna menghindari kecenderungan sikap anarkis dan eksklusivitas.
6. pengembangan sikap-sikap penuh toleransi dan apresiatif terhadap kelompok-kelompok agama lain untuk menciptakan masyarakat yang damai (salam) sebagaimana diajarkan oleh Islam.

Secara garis besar program Yayasan Wakaf Paramadina dikategorikan ke dalam Bidang Pendidikan¹⁶, Bidang Penerbitan¹⁷, Penelitian dan Kerjasama¹⁸ serta Lembaga-lembaga otonom¹⁹.

Berangkat dari visi tersebut, Paramadina kemudian mengadakan kursus-kursus keagamaan dengan mengundang pembicara-pembicara yang se-“jalan” dengan visinya, baik yang Muslim maupun non-Muslim dan inter-disipliner. Kursus-kursus itu sendiri bertempat di tempat yang selama ini dianggap mewah, yaitu di Plaza Pondok Indah dengan ruangan ber-AC. Kegiatan ini sendiri tidak saja diikuti oleh peserta muslim, tetapi juga non-muslim.

Para anggota Paramadina, yaitu peserta kajian islam menyambut antusias lembaga kajian Islam. Banyak antara mereka berlatar pendidikan sarjana atau pun pasca sarjana ataupun pernah mengenyam pendidikan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Latar belakang pekerjaan mereka pun bervariasi, mulai dari birokrasi, seperti pejabat departemen, maupun profesi, dokter, akuntan, yang secara ekonomi memperlihatkan mereka hidup berkecukupan serta memiliki akses pada sumber-sumber informasi, seperti buku, internet, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, dalam hal keagamaan mereka dapat dikatakan tengah mengalami kebingungan, berkenaan dengan pemahaman akan ajaran yang selama ini telah mereka anut yang sifatnya tradisional berhadapan dengan kehidupan perkotaan yang

¹⁶ Bidang Pendidikan terdiri dari lima (5) program, yaitu: **Klub Kajian Agama (KKA)** adalah forum kajian bulanan setiap Jum'at minggu ke III, bertempat di sebuah hotel, dan diikuti oleh sekitar 250 orang peserta yang terdiri atas anggota tetap dan peserta bebas. Dua Narasumber dihadirkan, satu orang yang menjaga kesinambungan materi dan tradisi, selama ini diemban oleh Cak Nur, dan pembicara tamu yang setiap bulannya bergantian. **Paket Studi Islam** adalah sebuah program berupa ceramah dan dialog agama untuk kelompok yang tergolong “kelompok penentu kecenderungan.” Mereka adalah para pengusaha, mahasiswa, dosen, kelompok cendekiawan serta kelompok profesi lainnya. **Paramadina Eksekutif** adalah sebuah program pelayanan masyarakat untuk kalangan eksekutif, baik swasta maupun pemerintah. **Seminar** adalah sebuah forum ilmiah yang mengangkat tema-tema aktual tentang masalah politik, budaya dan persoalan-persoalan yang sedang menjadi isu hangat di masyarakat. **Student Circle** adalah kajian bulanan yang diperuntukkan khusus bagi intelektual muda: peneliti, penulis, wartawan, mahasiswa, dan aktivis organisasi kemasyarakatan.

¹⁷ Bidang Penerbitan Paramadina ternyata juga memberikan *image* tersendiri bagi pengembangan ide dan gagasan yang bersemangat keterbukaan, dialogis, dan jujur. Melalui bidang penerbitan ini, semua ide dan gagasan tersebut menjadi bisa diakses oleh pembaca di segala tempat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat Ibu Kota Jakarta. Produk-produk penerbitan meliputi: *Buku; Kumpulan Tulisan*, biasanya terdiri dari makalah-makalah dialog KKA Paramadina; *Disertasi dan Tulisan Utuh*, yaitu berupa disertasi doktor, hasil penelitian, dari luar maupun dalam yang dianggap berkualitas bagus dan sejalan dengan visi Paramadina.

¹⁸ Lembaga-lembaga kerjasama terdiri dari: **Universitas ParamadinaMulya**, hasil kerja sama dengan Yayasan PondokMulya dengan mendirikan universitas bertaraf Internasional. **Forum Indonesia Muda (FIM)**, adalah kerjasama dengan harian Kompas dan LP3ES untuk menghidupkan tradisi intelektual di kalangan [kaum](#) muda, mahasiswa dan aktivis ormas. **Dialog Masyarakat Baru (DMB)**, bekerjasama dengan Media Indonesia, untuk kalangan bebas.

¹⁹ Lembaga-lembaga Otonom Paramadina terdiri dari **Lazis**, yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh; **Serambi Paramadina**, wadah silaturahmi dan pendalaman materi bagi mereka yang sudah pernah mengikuti paket kajian di Paramadina; **Sosma (Sosial Paramadina)** melayani proyek-proyek sosial, terutama yang berkaitan dengan pendidikan; **Rahma (Nasi Murah Paramadina)**.

modern.

Untuk itu, penyampaian materi dilakukan dengan metode dialogis, dengan mengembangkan diskusi.²⁰ Dengan metode diskusi diharapkan wawasan peserta menjadi terbuka dan tidak terjebak pada pemahaman keagamaan yang sempit dan diharapkan menyadarkan bahwa antara Islam dan pemahaman kita tentang Islam adalah sesuatu hal yang harus terus menerus diberikan konteksnya, senantiasa berupaya mendapatkan pemahaman Islam yang cocok dengan zamannya, maupun dengan pribadi masing-masing.

Selain dengan metode diskusi dalam penyampaian, isi materi pun diusahakan tidak berpihak pada satu pemahaman keagamaan, tapi dari berbagai macam gagasan yang pernah ada sepanjang sejarah Islam itu sendiri, dan menghindari pada hal yang sifatnya praktis, sehingga penyajian yang lebih terbuka, tidak sektarian dan inklusif.

KASUS 2: FRONT PEMBELA ISLAM

Front Pembela Islam (FPI) dideklarasikan pada hari Senin tanggal 24 Robi'uts Tsani 1419 H atau bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1998 jam 23.00 WIB bertempat di Pondok Pesantren Al Um Kampung Utan Ciputat Jakarta Selatan. Hingga saat ini, FPI telah memiliki tidak kurang dari 17 perwakilan di tingkat propinsi diseluruh Indonesia. Dan diperkirakan memiliki anggota resmi tercatat 5 juta orang dan memiliki simpatisan mencapai 15 juta orang.²¹ Untuk di Jakarta sendiri, sampai dengan Oktober 1999, perwakilan mereka sudah terbentuk di 30 Kecamatan.²²

Kelahiran organisasi ini segera mendapat sambutan terutama dari elemen-elemen sebagai berikut: **Habaib**, adalah jamak dari bahasa arab 'habib' yang berarti tercinta. Istilah ini secara sosial adalah sebutan bagi orang-orang yang secara garis keturunan masih ada hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW; **Ulama/kyai**, biasanya adalah orang yang memahami ilmu agama, atau orang yang memimpin suatu pondok pesantren maupun majlis taklim; **Santri**, para murid yang belajar ilmu agama dan mondok di pesantren yang dipimpin seorang kyai/ulama; **Mahasiswa**, secara personal banyak sekali mahasiswa yang masuk dalam FPI, namun secara kelembagaan FPI tidak memiliki lembaga kemahasiswaan; dan **Pedagang**.

Front Pembela Islam makin dikenal luas berkaitan dengan aksi-aksinya yang khas dan segera menjadi bahan pemberitaan media yang begitu gencar. Diawali dengan kasus Ketapang di Jakarta²³, dan kasus-kasus berikutnya, pasukan berseragam putih-putih, berbekal

²⁰ Penyampaian dengan metode seperti ini dapat dianggap baru, mengingat selama ini penyampaian agama (Islam) seringkali dilakukan satu arah atau dogmatis seperti dapat kita lihat dalam khutbah Jum'at ataupun pengajian-pengajian lain yang dilakukan di masjid

²¹ Lihat Gatra, 2000, No.08 tahun VI: 30

²² Tabloid Jumat, No.394, 1 Oktober 1999

²³ Peristiwa Ketapang meletusnya pada 22 Nopember 1998. Peristiwa ini terjadi ketika ratusan preman penjaga tempat hiburan di Jalan Ketapang Jakarta menyerbu warga sekitar dengan membawa pedang samurai terhunus dan menghancurkan kaca-kaca rumah, merusak masjid dan mengancam akan membakarnya. Kejadian tersebut menyebabkan 15 preman menemui ajalnya, dan selebihnya kabur. Menurut investigasi Majalah Tajuk (MT), kasus ketapang ini memiliki sebab sebelumnya dan akibat sesudahnya. Lebih jauh MT mengungkapkan bahwa peristiwa Ketapang ini dapat dikaitkankan dengan peristiwa Ambon yang meletus kemudian. Kerusuhan di Ambon menurut versi ini diawali dengan perebutan jalur emas yang menjadi lahan rezeki kalangan preman di daerah Priok-Hayam Wuruk-Gajah Mada-Mangga Besar antara geng preman Ambon Islam yang dipimpin Basri dan Ongen Sangaji dengan Ambon Kristen yang dipimpin oleh Milton, Ongky Pieters, Cornelis, dan lain-lain. Dua kelompok ini sudah bertahun-tahun memperebutkan jalur gemuk ini. Kemudian untuk memenangkan persaingan, kelompok Ongen Sangaji berusaha memanfaatkan FPI, melalui Habib Rizieq-nya. Perkenalan Ongen dengan Habib Rizieq sendiri menurut Badan Perjuangan Republik Indonesia diperantarai

bambu, golok, ketapel menyerang tempat-tempat yang dianggap sarang maksiat: kafe, hotel, diskotik maupun tempat hiburan lainnya.²⁴ Bahkan dalam beberapa penyerangan, tak jarang terjadi kontak fisik, mengingat biasanya tempat-tempat hiburan tersebut juga menyewa tenaga keamanan. Dalam aksi terbaru yang dilakukan pada saat memperingati Tahun Baru Hijriyah 1422 bertepatan tanggal 25-26 Maret 2001, FPI secara besar-besaran menggelar pawai dan aksi penuruan iklan-iklan (*billboard*) yang berbau pornografi dan minuman beralkohol, yang diikuti oleh lebih dari 1000 anggota lasykar yang berasal dari wilayah Jabotabek.²⁵

Selain itu, mereka juga pernah melakukan demonstrasi maupun pendudukan terhadap lembaga-lembaga kenegaraan, baik ditingkat lokal maupun nasional, diantaranya kantor pemerintah daerah DKI Jakarta²⁶; Markas Polda Metro Jaya²⁷; KOMNAS HAM²⁸; juga Kerja KPU (Komite Pemilihan Umum) juga tidak luput dari ultimatum FPI (Media Indonesia, 4 Juli 1999). Menjelang pemilu 1999, bahkan FPI sempat bentrok dengan satgas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di sekitar Markas Polres Jaktim²⁹.

Mereka juga giat menghimpun tenaga dan bantuan untuk membela sesama umat Islam yang sedang mengalami kesulitan. Dalam hal ini kasus konflik di Ambon yang terus berkecamuk FPI menyatakan diri siap diberangkatkan ke Ambon untuk membela ummat

oleh Habib Ali bin Alwi Ba'agil. Kelompok Ongen memberikan informasi bahwa tempat-tempat maksiat di Ibu Kota yang menjadi sasaran program FPI dibeking oleh kelompok Milton.

Informasi tersebut membuat Habib Rizieq marah dan memprotes keras keberadaan tempat-tempat maksiat itu. Bahkan dua hari sebelum meletus peristiwa ketapang, dalam sebuah acara peringatan Maulid Nabi di Jalan Pembangunan, Habib Rizieq dkk, menyatakan, sebelum Ramadhan Jakarta harus bersih dari bisnis Maksiat. Masih menurut MT, sebelumnya, pada bulan Mei-juni 1998 terjadi aksi perusakan sejumlah diskotik dan night club di jalur Puncak. Sindikat bisnis hiburan malam menyimpulkan, FPI yang ditunggangi oleh Ongen berada di belakang aksi itu. Karenanya Milton cs kemudian melakukan aksi balas dendam dengan menyerang warga muslim di Ketapang. Dalam aksi itu belasan preman dari kelompok Milton tewas. Sialnya, peristiwa itu kemudian berkembang menjadi isu SARA. Karena tersiar kabar bahwa preman-preman itu merusak masjid. Akibatnya beberapa Gereja di bakar sebagai balasan sebagai akibat massa terprovokasi. Lanjut Tajuk, bahwa preman-preman kelompok Milton yang biasa dikenal sebagai Ambon Hapas pun terus dikejar-kejar massa. Beruntung sebagian mereka bisa diamankan pihak aparat. Sejumlah preman terus ditahan, sebagian besar diantara mereka dilepas. Mereka yang bebas, demi keamanan jiwanya, terpaksa harus pulang ke Ambon. Mereka yang mudik ke Ambon inilah yang diduga keras diperalat untuk mengacaukan Ambon. Dugaan ini diperkuat dengan temuan Tim Pencari Fakta (TPF) Ambon, bahwa enam dari 18 orang yang tertembak dalam kerusuhan adalah anak buah Milton. Lihat *Suara Hidayatullah-04/XII/ Agustus 1999*, bandingkan hasil investigasi Majalah *Tajuk* No. 2, Tahun II-17 Maret 1999

²⁴ Pos Kota, 20 Desember 1999

²⁵ Kedua penulis berkesempatan mengikuti jalannya kegiatan tersebut, yang berlangsung dari jam 22.00WIB hingga menjelang Subuh. Pawai diawali dari markas FPI di Pejompongan, menuju Harmoni, Kota, Tanjung Priok, Cempaka Putih, dan berakhir di Markas. Menurut Ustad Ja'far, yang memimpin aksi tersebut, seminggu sebelum aksi ini digelar, kepada pengelola tempat-tempat hiburan ataupun mereka yang memasang iklan di jalan yang kami anggap berbau pornografi dan maksiat telah kami surati dan kami minta untuk menurunkannya, sampai batas waktu pelaksanaan aksi. Selain itu, FPI juga telah menyurati pihak-pihak terkait, seperti Pemda dan aparat polisi.

²⁶ Aksi "serangan fajaer" tersebut melumpuhkan aktifitas kantor Pemda DKI Jakarta, sebagai bentuk protes kepada Gubernur Sutiyoso untuk mencabut Surat Edaran No. 48/99 tentang pembatasan jam operasional tempat hiburan dan menutup total tempat hiburan selama bulan puasa. Lihat *Harian Merdeka*, Selasa 14 Desember 1999.

²⁷ Disatroninya FPI karena dianggap tidak tuntas mengusut masalah perjudian dan pornografi di Jakarta. Lihat *Media Indonesia*, 4 Juli 1999.

²⁸ Komnas HAM dianggap tidak aspiratif dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut ummat Islam seperti kasus Tanjung Priok, Lampung, Haur Koneng, Aceh dan sebagainya. Kerugian material dialami oleh KOMNAS HAM dengan kerusakan kaca dan peralatankantor lainnya. Bahkan FPI menolak keberadaan KOMNAS HAM, yang secara simbolik ditunjukkan dengan ditempelkan spanduk yang berbunyi "KOMNAS HAM DISEGEL OLEH FPI." Lihat *Republika*, Selasa 11 Januari 2000.

²⁹ Pasalnya beberapa ulama aktivis Partai Keadilan ditangkap satgas PDIP yang merasa tersinggung dan dijabloskan ke Polres dikarenakan tuduhan menyebarkan selebaran gelap yang berisi seruan untuk menolak calon presiden wanita, yang dianggap berlawanan dengan syar'i (hukum Islam). Meskipun yang ditahan adalah aktivis PK namun karena merasa satu ukhuwah akhirnya FPI ikut turun tangan untuk membebaskannya.

Islam di sana. “Mereka ini adalah pasukan Islam yang siap mengorbankan nyawanya untuk membela agama. Tinggal memberangkatkan saja”, tegas Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab dalam sebuah wawancara.³⁰

Menanggapi berbagai pemberitaan yang cenderung menyudutkannya, Habib Rizieq, dalam sebuah wawancara dengan penulis mengakui kesan radikal yang ditunjukkan FPI memperlihatkan kuatnya stigma atau cap untuk menjatuhkan Islam oleh musuh-musuh Islam. Akan tetapi hal itu juga menunjukkan ketangguhan Islam dalam menghadapi musuh-musuhnya.

Untuk menghadapi musuh-musuh Islam, kemudian dipilihlah nama “Front Pembela Islam” yang memiliki makna secara filosofis: **Front** menunjukkan bahwa organisasi ini selalu berusaha untuk ada di garis terdepan dan memiliki sikap tegas dalam setiap langkah perjuangan. Makna **Pembela** mengisyaratkan bahwa organisasi ini akan berperan aktif dalam membela dan memperjuangkan hak Islam dan Umat Islam. Kemudian makna **Islam** mencirikan bahwa perjuangan organisasi tidak lepas dari ikatan ajaran syariat Islam yang lurus dan benar³¹.

Karena itu, semenjak berdiri, FPI telah menggunakan Islam sebagai asasnya, yakni yang berorientasi kepada Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Sedangkan yang menjadi pedoman organisasi adalah: “Allah swt adalah tujuan kami, Muhammad saw adalah teladan kami, Alquran adalah pedoman kami, Jihad adalah jalan hidup kami, Syahid adalah cita-cita kami”. Bahkan secara terang organisasi ini memiliki semboyan organisasi “Hiduplah secara mulia atau matilah secara syahid”.

Dalam menjalankan gerakan tersebut, berdirinya FPI dimaksudkan untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar di segala aspek kehidupan.³² Apa yang dimaksud dengan **Amar Ma’ruf** adalah mengutamakan metode lembut dengan langkah: Mengajak dengan hikmah (ilmu dan amal), Memberi mau’izhoh hasanah (contoh tauladan) dan berdiskusi dengan cara yang terbaik. Sedangkan yang dimaksud dengan **nahi munkar** adalah dengan mengutamakan metode tegas dengan langkah menggunakan kekuatan/kekuasaan bila mampu; bila langkah pertama tidak mampu, menggunakan lisan/pena; dan bila kedua langkah tadi tidak mampu, menggunakan hati yang tertuang dalam ketegasan sikap.

Sebagai sebuah organisasi yang berbasis kemasyarakatan (ormas), struktur organisasi FPI dibangun berdasarkan dua pilar utama yakni Majelis Syura, sebagai dewan tertinggi FPI dan Badan Pengurus, sebagai pelaksana program FPI³³. Organisasi ini juga memiliki struktur dari tingkat pusat hingga daerah. Setiap orang yang beragama Islam dan berminat untuk bergabung dapat menjadi anggota FPI.³⁴

³⁰ Lihat *Majalah Tajuk*, , No.2, Th.II, 1999

³¹ Anggaran Dasar FPI, Bab I Kerangka Organisasi pada sub bab Filsafat Nama, ayat 2

³² *ibid*, Bab I pasal 4.

³³ FPI dipimpin oleh seorang ketua umum yang dibantu tiga orang ketua, seorang sekretaris jenderal dan seorang bendahara ahli. Badan pengurus membawahi 12 kepala departemen antara lain: departemen agama, departemen luar negeri, departemen dalam negeri, departemen hankam, departemen sospol dan hukum, departemen pendidikan dan kebudayaan, departemen ekuin, departemen ristek, departemen pangan, kesra, penerangan dan kewanitaan.

Disamping itu FPI memiliki enam badan khusus yang berada dibawah komando sekretaris jenderal, seperti Badan Intelijen front (BIF), badan anti teror (BAT), Badan Pengkaderan Mujahidin (BPM) Badan Bantuan Hukum (BBH), Badan Pencari Fakta (BPF), dan Badan Ahli Front (BAF). Disamping sederet nama di atas maka FPI membentuk anak organisasi yang memiliki tujuan mempercepat tercapainya cita-cita organisasi yakni Laskar Pembela Islam yang memiliki struktur khusus dan diatur dalam ketetapan tersendiri. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 AD/ART FPI

³⁴ Keanggotaan FPI terdiri dari: *Anggota umum*, yaitu orang Islam yang mengikuti prosedur pendaftaran, berumur minimal 15 tahun. Ia memiliki hak sebagaimana anggota organisasi secara umum seperti memilih dan dipilih, memberikan kritik, memperoleh perlindungan, ditingkatkan kesejahteraannya, diperhatikan segala keluh dan laporrannya dan sebagainya

Dalam menjalankan program-programnya FPI membentuk Laskar Pembela Islam (LPI), yang sebagian besar anggotanya adalah anak-anak muda.³⁵ Laskar dalam buku panduan didefinisikan sebagai “anggota militan FPI yang terlatih dan terbina secara jasmani dan rohani dengan tarbiyah Islamiyah yang khusus”. Laskar inilah yang seringkali kemudian terlibat dalam setiap aksi turun ke jalan.

DISKUSI

Dari dua potret lembaga keislaman di atas, kita bisa melihat bagaimana Islam senantiasa ditafsirkan berdasarkan konteks-konteks di mana penganutnya itu tinggal. Proses penafsiran ini tidak hanya pada teks-teks agama, tapi juga atas realitas itu sendiri. Dalam hal ini, proses pembangunan dimaknai secara berbeda, karena peran dan dampak yang ditimbulkan dari proses pembangunan tersebut. Disini kita melihat Paramadina, mencoba memberikan tafsir kemodernan atas teks-teks Islam untuk mengkontekstualisasi ajaran-ajaran Islam sehingga dapat berperan dalam pembangunan. Para peserta yang sebagian besar berasal dari golongan menengah itu memiliki latar belakang pekerjaan profesional. Artinya adanya pengakuan atas kemampuan profesinya.

Kehidupan perkotaan yang menuntut pada tindakan rasional, efisiensi pada akhirnya membawa dampak pada pemahaman keagamaan mereka yang orientasinya pada esensi atau substansi dari satu ajaran agama, dan menganggap fiqh atau aturan formal ibadah sebagai aktualisasi dari pemahaman akan esensi tersebut. Untuk memperkuat orientasi terhadap esensi tersebut penjelasan-penjelasan tidak hanya bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist ataupun juga sumber-sumber klasik Islam lainnya, tetapi juga didukung dengan penjelasan rasional yang seringkali berkiblat pada pencapaian ilmu pengetahuan (Barat). Dan

(Pasal 9 ayat 1 ART FPI). Sedangkan kewajibannya (ayat 2) adalah menjunjung citra perjuangan organisasi, menjaga nama baik pribadi maupun organisasi, mentaati tata tertib organisasi, mengikuti kegiatan dan perkembangan organisasi, mensukseskan program kerja Front, menjaga ukhuwah Islamiyah dan menerima sanksi jika melanggar dan seterusnya. *Anggota Khusus*, adalah adalah Ketua Umum, Majelis Syura dan badan pengurus lainnya. Setiap anggota khusus tidak diperkenankan sekaligus memegang rangkap jabatan (Pasal 3 ayat 1-3 ART FPI). Terakhir adalah *Anggota kehormatan*, untuk menjadi anggota kehormatan FPI dapat ditempuh melalui dua prosedur: *pertama*, para mantan anggota khusus secara otomatis menjadi anggota kehormatan. *Kedua* adalah cara non otomatis, yakni anggota yang diangkat secara istimewa oleh ketua umum FPI dengan persetujuan Majelis Syura. Anggota kehormatan memiliki kedudukan istimewa dari anggota umum. Beberapa hak istimewa adalah bahwa anggota kehormatan berhak menjadi peninjau dalam Munas/Munaslub FPI. Juga berhak mendapat pengawalan/pengamanan khusus bila diperlukan (pasal 11 dan 12 ART FPI).

³⁵Sebagai underbouw FPI, organisasi LPI memiliki beberapa kekhususan, diantaranya bahwa dalam LPI dikenal sistem kepangkatan dan sistem komando yang tersusun rapi seperti halnya militer. Ditingkat massa mereka dikenal sebagai laskar. Laskar ini terbagi dalam *jundi-jundi* (pasukan) yang komandani seorang *amir*. Seorang *amir* biasanya membawahi 21 laskar. Para amir berada dibawah komando *rois*, sedang *rois* bertanggung jawab kepada kepala staf LPI. Ditingkat atasnya LPI berada dalam komando Imam Besar yakni ketua umum dan wakilnya yakni sekretaris Jenderal FPI. Dalam tingkatan-tingkatan itu para laskar dan komandannya juga mengenal sistem kenaikan pangkat dan promosi. Untuk kenaikan pangkat biasanya dibutuhkan pelatihan dan gembengan yang cukup ketat baik lahir maupun batin. Penggembengan batin dapat dilakukan secara langsung maupun tidak. Biasanya penggembengan batin ini dilakukan melalui pendidikan keagamaan yang kuat. Sementara itu penggembengan fisik dilakukan secara intensif seperti melalui bela diri kungfu, silat maupun karate. Lihat investigasi *Jawa Pos*, 21 Januari 2000.

Sebegitu pentingnya keberadaan LPI dalam tubuh organisasi ini maka, keberadaannya kemudian diatur dalam peraturan khusus, dan diberikan panduan khusus. Sebuah buku kecil disusun oleh FPI untuk memberikan pengarahan bagi laskar. Diantaranya didalamnya tercantum pengertian laskar, fungsi laskar, asas perjuangan laskar, pedoman, semboyan, prinsip, motto, metode perjuangan, amanat perjuangan, wasiat perjuangan, doa perjuangan, struktur laskar, kepangkatan yang diantaranya menyangkut tertib pangkat, prosedur kenaikan pangkat, prosedur penurunan pangkat, pembagian golongan laskar dan sebagainya. Lihat buku *Panduan Lasykar Pembela Islam*.

beranggapan bahwa tafsir kekinian atas Islam menjadi sangat penting mengingat adanya dimensi ruang dan waktu yang berbeda antara zaman Rasul dan zaman sekarang.

Dengan corak ini apa yang bisa kita saksikan adalah bergesernya otorisasi penafsiran agama yang selama ini secara tradisional dipegang oleh ulama (kyai) kepada elemen-elemen yang mengarah intelektualisme, dalam hal ini dipengaruhi oleh para pemikir Islam, yang tidak saja memahami Islam dengan kaca mata klasik (Qur'an, Hadist, Kitab Kuning), tapi juga mengisinya dengan ilmu pengetahuan (Barat). Pergeseran juga bisa disaksikan dari orientasi keagamaan dari persoalan yang sifatnya formalitas (fiqh, ibadah) ke persoalan yang sifatnya substansial, isi dan hakekat dari agama itu sendiri. Pergeseran ini juga diakibatkan oleh makin meningkatnya akses informasi tentang Islam melalui peredaran buku-buku Islam, televisi, parabola maupun internet.

Berbeda, dengan Paramadina, FPI justru lebih cenderung melihat pada dampak atau akibat yang ditimbulkan dari proses pembangunan. Selain sebagian besar anggotanya adalah mereka yang termarginalisasi dalam proses pembangunan, dampak yang ditimbulkan pembangunan semakin mempersulit kehidupan mereka. Misalnya, salah satu alasan kenapa banyak pedagang di pasar Ciputat yang ikut FPI adalah untuk menghadapi kekerasan preman maupun aparat yang sering memalak. Belum soal kemaksiatan yang tentunya akan mengganggu dan melunturkan nilai-nilai keislaman.

FPI memperlihatkan manifestasi penderitaan panjang Ummat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa baik sipil maupun militer yang berakibat pada banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa. Kekerasan rezim Orde Baru menyisakan dendam dan sakit hati umat Islam dengan berbagai kasus, mulai dari kasus Tanjung priok, Haur Koneng, Lampung, dan yang masih terus berlangsung hingga kini Aceh, dan masih banyak kasus lainnya. Hal ini memunculkan kesadaran bertahan (*defensif*) yang terlihat dalam pilihan nama organisasi, atribut-atribut perjuangan dengan penggunaan istilah yang memiliki konotasi perang, keras dan ekstrim seperti: laskar, jihad, kostum/seragam, pembela, syahid, Front dan sebagainya.

Disini juga memperlihatkan bagaimana jaringan tradisional masih menjadi inti dari organisasi, dimana habaib, kyai dan ulama, sebagai orang yang dianggap memiliki otoritas keagamaan, melalui pesantren, majlis taklim, ataupun acara-acara tablig, dipergunakan untuk menghimpun anggota (massa) dan melakukan transformasi gagasan.

FPI menganggap bahwa pilihan perjuangan yang mereka lakukan merupakan respon atas kebekuan dakwah pola lama yang hanya berhenti dari mimbar ke mimbar dan tidak menyentuh real permasalahan praktis. Dan merupakan antisipasi terhadap lingkungan sosial yang cenderung mengeras dan kejahatan/kemaksiatan yang terstruktur.

PENUTUP

Dua lembaga di atas, menggambarkan dinamika Islam, Islam berwajahdari kultural dan struktural, yang intelektual dan yang aktifisme, yang esensial dan yang formal. Apa yang ditengarai oleh Jalaluddin Rakhmat, yang melihat Islam di Indonesia tengah bergerak kepada Islam intelektual³⁶ setelah sekian lama berada pada Islam aktivisme³⁷, yaitu upaya untuk

³⁶Lihat Jalaluddin Rakhmat, "Kemana Arah Pemikiran Islam", makalah disampaikan pada Seminar Peringatana 70 tahun Prof. Dr. Harun Nasution, 23 September 1989 di Jakarta. Lebih jauh ia menegaskan bahwa, sedikitnya terdapat tiga cara yang dilakukan oleh Islam Intelektual untuk mendobrak mandegnya pemikiran Keislaman, yaitu pertama, kelompok pemikir yang mencoba menggali sumber pemikiran Islam klasik dan mengaktualisasikannya kembali pada masa kini. Kedua, kelompok pemikir yang mencari inspirasi dari mazhab-mazhab lain yang terdapat dalam Islam, seperti Mu'tazilah

mendobrak stagnasi pemikiran Islam dengan berbagai cara, perlu dicermati kembali. Karena justru Islam Aktivisme masih menjadi pilihan pergerakan Islam di Indonesia.

Disini kiranya, perlu secara terus menerus dilakukan apa yang oleh Kuntowijoyo maksudkan sebagai upaya obyektifikasi Islam,³⁸ yaitu penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif.³⁹ Sebuah perbuatan dikatakan objektif apabila perbuatan tersebut tersebut dirasakan oleh orang non-Islam sebagai sesuatu yang natural (sewajarnya), tidak sebagai perbuatan keagamaan. Dengan melakukan obyektifikasi, Islam akan menjadi agama yang terbuka (inklusif), dan terlepas dari pemikiran yang sempit dan dogmatis.

Dengan demikian pekerjaan rumah umat Islam masih banyak dan panjang untuk menuju demokrasi.

dan Syi'ah. Sedangkan kelompok ketiga mengambil ilham dari pemikiran filsafat Barat dan analisis kebudayaan Barat dari sejumlah nilai yang diidentifikasi dan kemudian diberi kemasakan Islam. Menurut hemat penulis, ketiga kelompok tersebut dapat ditemui pada lembaga Paramadina, melalui kursus-kursus yang diadakannya.

³⁷Sedangkan pada Islam aktivisme, Kang Jalal (demikian ia biasa dipanggil) melihat ada empat "aliran" yang termasuk dalam gerakan ini, yaitu pertama, "ritualisme" yaitu gerakan Islam yang memandang pentingnya mempertahankan ritsus Islam, seperti ibadah, cara makan, berkeluarga. Kedua, "filantropisme" yaitu gerakan yang ingin mengamalkan Islam sebagai agama "rahmatan lil 'alamin", membela kaum yang lemah dan terpinggirkan dari pembangunan. Ketiga, "misticisme" yaitu gerakan yang mempraktekkan dimensi spiritual ajaran Islam melalui tarekat atau tasawuf untuk menyucikan bathin. Sedangkan keempat, yaitu "radikalisme" gerakan yang bermaksud merombak status quo, untuk melakukan perubahan struktural.

³⁸Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.

³⁹Objektifikasi bermula dari proses internalisasi, bukan dari subjektivikasi. Objektifikasi berbeda dengan sekularisasi. Skema berikut akan menjelaskan kedudukan objektifikasi di tengah-tengah terminologi lain, yaitu internalisasi, eksternalisasi, subjektivikasi, dan gejala objektif:

internalisasi	<----->	eksternalisasi
	obyektifikasi	
subyektifikasi	<----->	gejala obyektif

Eksternalisasi berarti perwujudan dari keyakinan (agama) yang dihayati secara internal. Misalnya membayar zakat. Zakat timbul setelah ada keyakinan tentang perlunya harta dibersihkan, keyakinan tentang perlunya harta dibersihkan, keyakinan bahwa sebagian harta itu bukan milik orang yang mendapatkannya, dan keyakinan bahwa rezeki itu harus dinafkahkan. Kalau kemudian orang membayar zakat, itu disebut eksternalisasi. Jadi eksternalisasi adalah ibadah.